

**DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Dina Rahmayanti

No. Mahasiswa: 14312006

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Dina Rahmayanti

No. Mahasiswa: 14312006

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Penulis,



Dina Rahmayanti

**DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

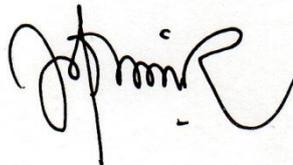
Nama: Dina Rahmayanti

No. Mahasiswa: 14312006

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ...15-5-2018

Dosen Pembimbing,



(Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

Disusun Oleh : **DINA RAHMAYANTI**

Nomor Mahasiswa : **14312006**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 4 Juni 2018

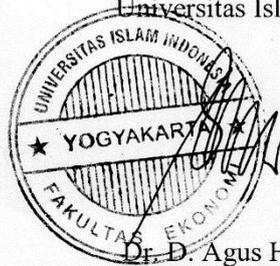
Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
(QS. Al-Baqarah : 153)

“Usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah bohong.”

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahiraobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'atnya dan yang telah menuntun umat manusia ke jalan kebenaran. Penulis juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**" ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan yang dapat dilakukan oleh penulis hanyalah berusaha. Usaha dan kerja keras penulis lakukan dengan iringan dukungan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memudahkan dan melancarkan segala sesuatu urusan maupun kegiatan penulis.
2. Orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, kasih sayang, dan tidak pernah lelah dalam mengingatkan segala kewajiban yang harus penulis laksanakan.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, kritikan, nasehat, dan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak D. Agus Hardjito, Drs., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, pegawai, dan staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Kakak tercinta yang telah memberikan dorongan dan dukungan untuk dapat berlomba dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabar tercinta, Nelly, Nanda, Ira, Ninu, Rubi dan Adel teman seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan yang selalu memberikan dukungan dan dorongan.

10. Lisa yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membantu penulis untuk mempelajari dan menyelesaikan penelitian ini, serta Annisa Nursita yang selalu memberikan dorongan dan meningkatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Reni, Yunita, Nadya, Antok, Rico, dan teman-teman IPAPIKA yang selalu memberikan bantuan dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Kakak Ajeng yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penulis untuk memperoleh data.
13. Teman-teman angkatan FE UII, semoga kita akan bertemu suatu hari nanti dengan berbagai kesuksesan yang kita raih.
14. Pihak-pihak yang telah membantu dan memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi yang tak mungkin dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun masih banyak terdapat kekurangan semoga skripsi ini dapat berguna untuk dapat dijadikan referensi bagi berbagai pihak yang akan melakukan penelitian serupa. Akhir kata penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Dina Rahmayanti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara	v
Halaman Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstract	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Stewardship Theory dalam Pemerintahan.....	12
2.1.2 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan	13
2.1.3 Ukuran Pemerintah.....	15
2.1.4 Kekayaan Daerah	15
2.1.5 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	16
2.1.6 Umur Pemerintah Provinsi	17
2.1.7 Temuan Audit.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Penelitian	23

2.4	Hipotesis Penelitian.....	24
2.4.1	Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	24
2.4.2	Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	25
2.4.3	Pengaruh Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi ..	26
2.4.4	Pengaruh Umur Pemerintah Provinsi Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	27
2.4.5	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	28
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Populasi dan Sampel	30
3.2	Metode Pengumpulan Data	31
3.3	Variabel Penelitian	31
3.3.1	Variabel Dependen.....	31
3.3.2	Variabel Independen	32
3.4	Metode Analisis Data.....	36
3.4.1	Statistik Deskriptif	36
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	37
3.4.3	Analisis Regresi Berganda	38
3.4.4	Uji Koefisien Determinasi.....	39
3.4.5	Uji Hipotesis.....	39
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1	Pemilihan Sampel.....	40
4.2	Analisis Deskriptif	42
4.3	Uji asumsi Klasik	45
4.3.1	Uji Normalitas.....	46
4.3.2	Uji Mutikolinearitas	47
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.4	Analisis Regresi Berganda	49
4.5	Uji Koefisien Determinasi.....	51

4.6 Uji Hipotesis.....	52
4.7 Pembahasan.....	54
4.7.1 Ukuran Pemerintah.....	55
4.7.2 Kekayaan Daerah	56
4.7.3 Jumlah SKPD	57
4.7.4 Umur Pemerintah Provinsi	58
4.7.5 Temuan Audit.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Opini LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016.....	4
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Table 4.1 Kriteria Sampel Penelitian	41
Table 4.2 Statistik Deskriptif	42
Table 4.3 Hasil Uji Normalitas	46
Table 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Table 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	49
Table 4.6 Analisis Regresi Berganda	50
Table 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	24
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel <i>Checklist</i> Kriteria Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan	66
Lampiran 2 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	76
Lampiran 3 Ukuran Pemerintah	78
Lampiran 4 Kekayaan Daerah.....	80
Lampiran 5 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah	82
Lampiran 6 Umur Pemerintah Provinsi	83
Lampiran 7 Temuan Audit	84
Lampiran 8 Hasil Uji dan Regresi.....	85

ABSTRACT

This research aims to examines and analyzes the determinants level of affecting of principal government disclosure. The population of this study is financial statements of provincial governments in Indonesia during 2014-2016. The sampling method is purposive sampling method, and analysis model uses multiple regression analysis. The results of this study show that wealth of the region has an effect on the disclosure level of provincial government financial statements, while size of government, number of units under provincial (SKPD), age of provincial government, and number of audit finding are proved to have no effect on the disclosure level of provincial government financial statements.

Keyword : disclosure level, regional wealth, provincial government, government accounting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pemerintah provinsi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2014-2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, dan model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi, sedangkan ukuran pemerintah, jumlah SKPD, umur pemerintah daerah dan jumlah temuan audit terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Kata kunci : tingkat pengungkapan, kekayaan daerah, pemerintah provinsi, akuntansi pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia mulai memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di mana setiap urusan pemerintah sebagian dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah ini diambil supaya pemerintah daerah bisa mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar dapat tercipta pemerintahan yang bersih. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa presiden, gubernur, bupati, dan walikota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan APBN/APBD yang setidaknya laporan keuangan tersebut berisikan Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Upaya untuk menciptakan pemerintah yang bersih dapat disajikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasar pada

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan acuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan dapat merupakan sebuah mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara jelas dan terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca laporan. Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa laporan keuangan dibuat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi peraturan yang berlaku saja, tetapi juga merupakan sebuah informasi yang dapat dipahami dan dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat sebuah keputusan.

Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian dapat disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat. Laporan keuangan yang telah diaudit dan telah diberikan pengungkapan dari hasil audit BPK dapat menjadi informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, sebagaimana hakikat dari tujuan laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK akan memberikan hasil berupa opini. Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP PP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini yang diharapkan oleh setiap instansi untuk menunjukkan bahwa pengungkapan yang telah dilakukan oleh pemerintah benar-benar baik dan dapat dipercaya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat diperoleh dengan memenuhi beberapa kriteria seperti, kesesuaian pelaporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, adanya pengungkapan yang memadai, terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (Effendy, 2013). Terpenuhinya keempat kriteria tersebut, maka transparansi dan akuntabilitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah juga dapat terpenuhi. Adanya transparansi dalam penyediaan informasi laporan keuangan dapat memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Pengungkapan di dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Minimum pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku adalah pengungkapan bersifat wajib (Yulianingtyas, 2010).

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dengan menyatakan bahwa entitas pelapor mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran, dalam paragraf-paragraf selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang dibutuhkan bagi pengguna. Hal tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam membaca laporan.

Pemenuhan atas pengungkapan juga berguna dan memudahkan pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi adalah menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan dapat tercapai.

Berdasarkan dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang menunjukkan bahwa opini yang diperoleh atas laporan keuangan pemerintah provinsi adalah Wajar Tanpa Pengecualian pada 31 LKPD Provinsi atau sebanyak 91% LKPD Provinsi dan sisanya adalah opini Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 3 LKPD Provinsi atau 9% dari LKPD Provinsi. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa LKPD Provinsi yang belum mendapatkan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat disebabkan oleh kelemahan penyajian laporan keuangan di mana beberapa akun tidak disajikan sesuai dengan SAP yang berlaku. Hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi pada tahun 2016 telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015. Peningkatan kualitas LKPD Provinsi akan disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Table 1.1 Opini LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016

Tahun	Opini BPK					Total
	WTP	WTP PP	WDP	TW	TMP	
2014	25	2	6	0	1	34
	74%	6%	18%	0%	3%	

2015	29	0	5	0	0	34
	85%	0%	15%	0%	0%	
2016	31	0	3	0	0	34
	91%	0%	9%	0%	0%	

Sumber : LHP Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2016

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah masih menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih tergolong rendah, dengan rata-rata pengungkapan sebesar 22% (Lesmana, 2010), 30,85% (Yulianingtyas, 2010), 52,09% (Setyaningrum & Syafitri, 2012), dan 59,99% (Khasanah & Rahardjo, 2014). Pengungkapan dengan tingkat rata-rata tertinggi ditunjukkan pada penelitian (Setyowati, 2016) dengan rata-rata sebesar 64%, sedangkan penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah dilakukan menunjukkan rata-rata pengungkapan sebesar 44,56% (Hilmi, 2012). Hasil dari laporan keuangan pemerintah provinsi yang diungkapkan masih terbilang rendah, sehingga peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Perbedaan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah peneliti akan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hilmi, 2012) menggunakan teori *agency*, dimana teori *agency* menjelaskan tentang hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer). Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya susah untuk tercipta, karena adanya kepentingan yang saling

bertentangan, di mana masing-masing memiliki kepentingannya secara pribadi (Raharjo, 2007). Menurut pengertian tersebut peneliti merasa bahwa teori tersebut kurang cocok apabila diterapkan di dalam pemerintahan, karena dalam hubungannya dengan pemerintahan, teori yang cocok untuk digunakan adalah teori *stewardship*. Yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemberi amanah) dengan *steward* (penerima amanah), di mana *steward* akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah selaku *steward* yang memiliki banyak informasi dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat selaku *principal* harus memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti bermaksud menggunakan teori *stewardship* di dalam melakukan penelitian ini, karena teori *stewardship* dirasa lebih cocok untuk diterapkan di dalam penelitian ini.

Beberapa variable yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah, kekayaan daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), umur pemerintah, dan temuan audit. Ukuran pemerintah pada penelitian ini diproksikan dengan total aset pemerintah yang memiliki jumlah yang besar akan menunjukkan seberapa besar pemerintahan itu pula. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula tuntutan dalam transparansi pengungkapan atas pengelolaan keuangan. Kekayaan daerah merupakan gambaran atas kemakmuran daerah tersebut, di mana kekayaan daerah diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan pendanaan yang berasal dari kontribusi masyarakat. Semakin besar pendapatan asli daerah pada suatu daerah,

maka semakin besar pula kewajiban pemerintah dalam melakukan transparansi pengungkapan laporan keuangan.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas suatu pemerintah daerah untuk membangun daerah. Semakin besar urusan suatu daerah maka semakin besar pula tingkat pengungkapan yang harus dilakukan. Begitu pula dengan umur pemerintah yang dapat diartikan sebagai seberapa lama pemerintahan tersebut berlangsung. Semakin lama umur pemerintahan akan mempengaruhi kualitas dari pengungkapan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan pengalaman pada pemerintahan tersebut. Audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan membuat pemerintah mendapatkan permintaan untuk melakukan koreksi dan peningkatan pengungkapan, maka semakin besar temuan audit maka semakin besar pula tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena semakin besar jumlah temuan audit oleh BPK, maka menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah memiliki kondisi yang buruk. Penelitian ini akan mencoba untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan di atas.

Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan jawaban atas ketidak konsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Variabel yang paling sering digunakan dalam penelitian sejenis adalah kekayaan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Hilmi, 2012) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi menyatakan bahwa

kekayaan daerah berpengaruh positif. Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati, 2016). Namun, hal berbeda justru diungkapkan oleh (Khasanah & Rahardjo, 2014) yang melakukan penelitian untuk menguji tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan.

Variabel lain yang biasa muncul dan masih menunjukkan adanya perdebatan adalah variabel jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Rahardjo, 2014) menunjukkan bahwa jumlah SKPD memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lesmana, 2010), (Yulianingtyas, 2010), dan (Hilmi, 2012) yang menyatakan bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya ketidakkonsistenan hasil atas faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan membutuhkan penelitian lanjutan guna menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan (Lesmana, 2010) dan (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menjelaskan bahwa umur administrasi pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Khasanah & Rahardjo, 2014) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya pernyataan di atas, penulis akan melakukan pertimbangan dengan melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah provinsi. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dengan judul “**DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi?
2. Apakah kekayaan daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi?
3. Apakah jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi?
4. Apakah umur pemerintah provinsi mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi?
5. Apakah temuan audit mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apa pengaruh ukuran pemerintah, kekayaan

daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, umur pemerintah provinsi, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan yang berguna antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat selaku pembuat Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Bagi pemerintah provinsi sebagai pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penyediaan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi agar dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Bagi profesi di bidang akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain pada bidang kajian sejenis.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang penjelasan mengenai teori-teori yang akan melandasi penelitian, variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan penarikan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang jumlah sampel yang diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data, pengujian dan penjelasan atas hipotesis yang telah dibuat, dan pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya dan pihak yang berkepentingan lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Stewardship Theory* dalam Pemerintahan

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan tentang situasi dimana para penerima amanah tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang, melainkan lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Berdasarkan asumsi filosofis, teori *stewardship* merupakan suatu teori yang dibangun berdasarkan sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Said, 2015). Teori ini juga menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, di mana kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen.

Hubungan yang dijelaskan dalam teori *stewardship* adalah hubungan antara *principal* dan *steward*. Dasar dari teori ini adalah psikologi dan sosiologi, di mana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pihak pemberi amanah (*principal*). Perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha untuk dapat mencapai sasaran organisasi tersebut (Khasanah, 2014).

Dalam hubungannya dengan pemerintahan, pemerintah berlaku sebagai pihak yang diberikan amanah dan memiliki banyak informasi serta bertanggung jawab

atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat dan harus memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya tujuan tersebut dapat memberikan kepuasan atas kinerja pemerintahan yang baik terhadap rakyat yang telah memberikan amanah pada saat pemilu.

2.1.2 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Laporan keuangan disajikan dengan tujuan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan aktivitas yang telah dilakukan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pengungkapan harus dapat memberikan informasi yang material dan relevan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan yang baik juga

harus disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman. Pengungkapan harus dapat menambah nilai informasi dan bukan mengurangnya dengan adanya keterangan yang terlalu rinci dan sulit untuk dianalisis.

Pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas dari suatu unit usaha, untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan adalah pengungkapan yang cukup, wajar, dan lengkap (Ghozali & Chariri, 2007). Pengungkapan yang paling umum untuk digunakan dari ketiga konsep ini adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan dengan kriteria cukup dapat mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

Pengelompokan pengungkapan dalam laporan keuangan terdapat dua bagian, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan lengkap yang menyajikan informasi-informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan tambahan yang tidak diwajibkan oleh standar akuntansi dan dianggap relevan dan berguna bagi pemakai laporan keuangan.

2.1.3 Ukuran Pemerintah

Terdapat beberapa variabel yang dapat menggambarkan ukuran suatu entitas. Variabel tersebut adalah total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Khasanah, 2014). Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu daerah maka semakin besar pula ukuran pemerintah daerah tersebut. Semakin banyak penjualan, maka semakin banyak modal yang akan ditanam, dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin besar entitas tersebut dapat dikenal masyarakat. Ketiga variabel tersebut dapat digunakan dalam mengukur besarnya ukuran karena kemampuan ketiga variabel tersebut dalam mewakili seberapa besar entitas tersebut.

Variabel yang dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran pemerintahan adalah total aset. Total aset dipilih karena memiliki nilai yang lebih stabil jika dibandingkan dengan penjualan dan kapitalisasi pasar. Pemerintah dengan ukuran atau total aset yang lebih besar akan cenderung lebih kompleks dalam mengelola dan menjaga asetnya. Konsekuensinya, pemerintah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang aset yang dimiliki dan menaruh perhatian lebih tinggi terhadap pengungkapan wajib sesuai dengan standar akuntansi (Yulianingtyas, 2010).

2.1.4 Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Kekayaan daerah diporsikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut berarti bahwa pendapatan asli daerah berasal dari kontribusi masyarakat di setiap daerah masing-masing.

Pendapatan asli daerah yang besar akan dapat memicu partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah selalu dilakukan untuk memicu pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat yang pada akhirnya daerah dapat mandiri. Berdasarkan teori *stewardship* maka pemerintah daerah berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerja yang baik melalui hasil kekayaan yang besar dan sumber daya yang banyak, sehingga berupaya mengungkapkannya dengan lebih baik pada laporan keuangannya (Khasanah & Rahardjo, 2014).

2.1.5 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi yang dimaksud adalah satuan kerja perangkat daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah juga merupakan perangkat daerah pada pemerintahan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah, maka semakin kompleks pemerintahan dalam melakukan tugasnya (Hilmi, 2012). Tugas pemerintahan yang

semakin kompleks akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Hal tersebut terjadi karena semakin besarnya tekanan dari rakyat selaku pemberi amanah terhadap pemerintah untuk melakukan pengungkapan yang besar sesuai dengan tugas pemerintahan yang semakin kompleks sebagai bukti dari pertanggungjawaban.

2.1.6 Umur Pemerintah Provinsi

Umur suatu organisasi dapat dilihat dari seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. Umur administratif pemerintah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Umur pemerintahan akan memiliki korelasi dengan kelengkapan laporan tahunan. Pemerintah daerah yang memiliki umur yang lebih lama akan lebih tinggi pada tingkat pengungkapan laporan keuangannya, karena semakin tua umur suatu daerah akan memiliki pengalaman yang lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.7 Temuan Audit

Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan-pernyataan ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Khasanah, 2014). Audit negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Hasil dari

pemeriksaan audit dapat berupa opini, temuan, kesimpulan, atau dalam bentuk rekomendasi.

Temuan audit oleh BPK merupakan kasus-kasus di dalam laporan keuangan pemerintah yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya temuan audit oleh BPK akan mempengaruhi besarnya pengungkapan sebagai koreksi. Semakin besar jumlah temuan audit, maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena semakin besar jumlah temuan audit oleh BPK, maka menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah memiliki kondisi yang buruk.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan pemerintah provinsi masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan penelitian mengenai tingkat pengungkapan pemerintah daerah. Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib pernah dilakukan oleh (Lesmana, 2010). Penelitian tersebut menyatakan bahwa dari 6 variabel yang diteliti hanya 2 yang menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib. Variabel tersebut adalah umur pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Variabel lainnya, yaitu ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Penelitian tentang karakteristik pemerintah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan daerah pernah dilakukan oleh

(Yulianingtyas, 2010). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ketiga karakteristik pemerintah daerah yaitu ukuran daerah, jumlah SKPD, dan status pemerintah daerah menunjukkan bahwa karakter tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan daerah.

Penelitian oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan menggunakan 9 variabel di dalam penelitiannya. Empat variabel diantaranya memiliki hasil yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Variabel tersebut adalah ukuran legislatif, umur administratif pemda, kekayaan pemda, dan *intergovernmental revenue*. Variabel lainnya menunjukkan hasil yang berlawanan, yaitu tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Diantaranya adalah ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

(Setyowati, 2016) melakukan penelitian tentang determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kekayaan pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel aset berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan diferensiasi fungsional, debt, dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan pemerintah provinsi masih sedikit dilakukan. Beberapa diantaranya dilakukan oleh Hilmi (2012) dan Hendriyani &

Tahar (2015). Penelitian oleh (Hilmi, 2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi menggunakan tiga kelompok, yaitu karakteristik pemerintah, kompleksitas pemerintahan, dan hasil pemeriksaan.

Kategori karakteristik pemerintah menunjukkan hasil bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif, hal tersebut dikarenakan pemerintah provinsi yang memiliki kekayaan yang lebih besar dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Variabel tingkat ketergantungan dan total aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Kategori kompleksitas pemerintahan menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar. Jumlah SKPD tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Kategori hasil pemeriksaan memberikan hasil bahwa tingkat penyimpangan berpengaruh positif, hal tersebut karena semakin besar tingkat penyimpangan yang ditemukan oleh BPK akan mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan. Jumlah temuan audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Penelitian oleh (Hendriyani & Tahar, 2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi menyatakan bahwa dana alokasi umum, tingkat ketergantungan, pendapatan asli daerah, dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan. Variabel lainnya berupa

belanja modal dan jumlah penduduk menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
1.	2010	Lesmana	Umur Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kewajiban, Pendapatan Transfer, Jumlah SKPD	Hasil penelitian menyatakan bahwa umur pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan waib.
2.	2010	Yulianingtyas	Ukuran Daerah, Jumlah SKPD, Status Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan daerah.
3.	2012	Setyaningrum dan Syafitri	Ukuran Legislatif, Umur Administratif Pemda, Kekayaan Daerah, <i>Ingovermental Revenue</i> , Ukuran Pemda, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Pembiayaan Utang,	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 4 variabel berupa ukuran legislatif, umur administratif pemda, kekayaan pemda, dan <i>ingovermental revenue</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Lima variabel lainnya yaitu ukuran pemda, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan

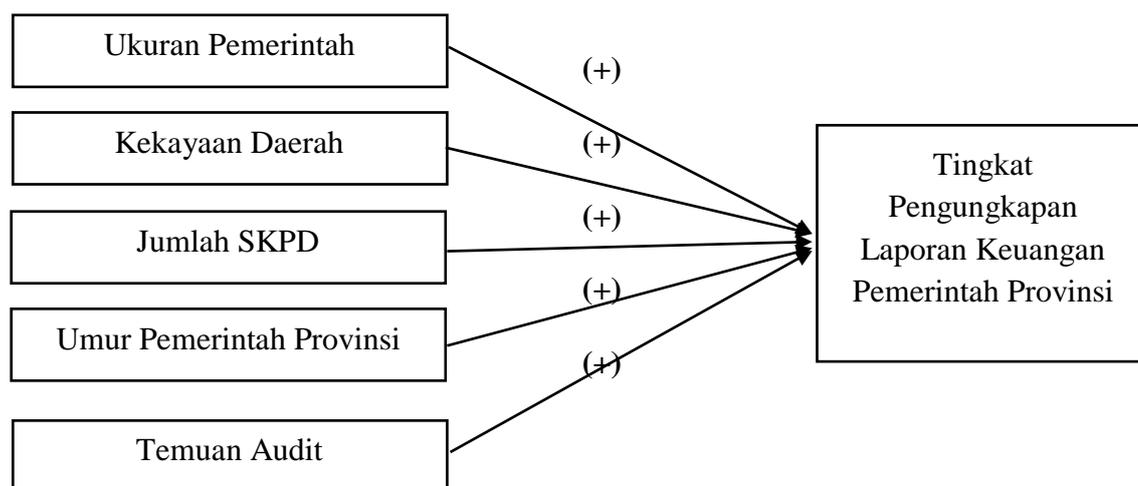
			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
4.	2012	Hilmi	Kekayaan Daerah, Jumlah Penduduk, Tingkat Penyimpangan, Tingkat Ketergantungan, Total Aset, Jumlah SKPD, Temuan Audit	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Variabel lainnya yaitu tingkat ketergantungan, total aset, jumlah SKPD, dan temuan audit tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.
5.	2015	Hendriyani dan Tahar	Dana Alokasi Umum, Tingkat Ketergantungan, Pendapatan Asli Daerah, Temuan Audit, Belanja Modal, Jumlah Penduduk	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum, tingkat ketergantungan, pendapatan asli daerah, dan temuan audit tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Variabel lainnya yaitu belanja modal, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

6.	2016	Setyowati	Kekayaan Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Aset, Diferensiasi Fungsional, Debt, <i>Ingovermental Revenue</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kekayaan pemerintah daerah, dan indeks embangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel aset berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel diferensiasi fungsional, debt, dan <i>ingovermental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
----	------	-----------	--	--

2.3 KERANGKA PENELITIAN

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pengaruh beberapa karakteristik pemerintah provinsi terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, terlebih dahulu akan dikembangkan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu model terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan pada kerangka proses berpikir. Berikut gambaran kerangka konseptual:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian



2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Pemerintahan dengan ukuran yang besar akan cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar jika dibandingkan dengan pemerintahan yang lebih kecil. Ukuran pemerintahan dapat diproksikan dengan menggunakan total aset. Aset merupakan salah satu sumber daya yang digunakan oleh suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Sumber daya dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah dengan total aset yang semakin besar dan kompleks akan membutuhkan pengelolaan aset yang baik, sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih besar terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan aset.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melaporkan pengungkapan secara lengkap sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan tersebut

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Rahardjo, 2014) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

Ukuran pemerintahan yang besar akan berdampak pada tekanan publik dalam melaporkan pengungkapan wajib yang besar pula. Tuntutan tersebut akan berdampak besar pada kinerja pemerintah. Penelitian yang mendukung pernyataan tersebut dilakukan oleh (Sumarjo, 2010) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₁ : Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

2.4.2 Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Kekayaan daerah diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Sebagian besar sumber kekayaan daerah berasal dari masyarakat, berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, semakin besar PAD atau kekayaan daerah maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Partisipasi masyarakat yang besar akan berdampak pada besarnya kekayaan daerah, sehingga semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar tingkat

pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan yang akan mendorong peningkatan dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah dengan kekayaan yang besar akan berupaya untuk melakukan pengungkapan yang baik pada laporan keuangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hilmi, 2012) menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Pendapat yang sama diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati, 2016) yang juga menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_2 : *Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.*

2.4.3 Pengaruh Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Pemerintah daerah terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pembangunan daerah dapat digambarkan dengan seberapa besar jumlah urusan yang menjadi prioritas pada pemerintah daerah. Semakin banyaknya urusan pemerintah yang menjadi prioritas, maka tugas pemerintahan akan menjadi semakin kompleks (Hilmi, 2012).

Semakin kompleks tugas pada suatu pemerintahan berarti menggambarkan bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah semakin banyak. Semakin banyak jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas yang kompleks mengakibatkan semakin banyaknya tekanan untuk dapat melakukan pengungkapan informasi sebagai upaya untuk memenuhi pengungkapan laporan keuangan pemerintahan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Rahardjo, 2014) memberikan hasil yang mendukung uraian diatas. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₃ : Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

2.4.4 Pengaruh Umur Pemerintah Provinsi Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Umur suatu pemerintahan dapat diartikan dengan seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. Pemerintah yang memiliki umur yang lebih tua akan memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang baru, pengertian tersebut juga dapat berlaku pada sistem administrasi. Pemerintah yang lebih tua akan lebih paham dengan peraturan dan standar-standar yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena laporan keuangan pada tahun sebelumnya telah diperiksa dan hasilnya dievaluasi untuk dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki

sebagai pedoman pengungkapan laporan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyatakan bahwa umur administratif pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh (Lesmana, 2010) juga menyatakan bahwa umur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. Semakin lama keberadaan suatu pemerintah daerah, maka secara pengalaman akan lebih unggul daripada pemerintah daerah yang masih baru. Pada sistem administrasi pemerintah dengan umur yang lebih tua memiliki proses yang lebih berpengalaman dan pencatatan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₄ : Umur pemerintah provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

2.4.5 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Temuan audit merupakan penemuan kasus-kasus penyimpangan terhadap laporan keuangan yang ditemukan oleh pihak BPK atas ketidak sesuaian pengungkapan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Semakin banyak temuan audit yang ditemukan oleh pihak BPK akan menunjukkan bahwa terdapat banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, yang berarti bahwa kondisi pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi adalah dalam kondisi yang buruk. Dengan kata lain, semakin

tinggi angka temuan audit maka akan menunjukkan rendahnya atau buruknya tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka temuan audit maka tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi adalah baik.

Penelitian oleh (Hendriyani & Tahar, 2015) menyatakan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Mustikarini & Fitriyani, 2007) membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang salah satunya mencakup pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang artinya semakin besar temuan audit maka semakin buruk tingkat kinerja pemerintah daerah yang di dalamnya mencakup pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan semakin besar pelanggaran oleh pihak pemerintah menyebabkan kurangnya transparansi dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₅ : Temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu yang dapat diperoleh dan dapat memberikan informasi yang berupa data untuk membantu dalam penelitian. Dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian (Arifin, 2017). Penelitian ini menggunakan populasi berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan tahun anggaran 2014 hingga tahun 2016. LKPD yang digunakan merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sampel penelitian merupakan sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Arifin, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2014-2016, karena didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang digunakan dapat menyajikan informasi yang *up to date* sehingga bisa memberikan gambaran mengenai kondisi pemerintah provinsi terkini. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti sehingga sampel hanya representatif untuk populasi yang diteliti (Arifin, 2017). Pertimbangan yang dimaksud dapat berupa kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pertimbangan atau kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2014-2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menyediakan data yang lengkap pada periode 2014-2016 yang diperlukan dalam proses penelitian, seperti tersedianya data-data non keuangan berupa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, atau yang sering disebut dengan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data atau publikasi lainnya (Siyoto & Sodik, 2015). Data yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Data yang akan diambil pada penelitian ini adalah data dari laporan keuangan pemerintah daerah provinsi periode anggaran tahun 2014-2016.

3.3 VARIABEL PENELITIAN

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat atau disebut variabel output, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena terdapat variabel bebas atau independent (Siyoto & Sodik, 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

dimaksud ialah berupa perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Hasil dari perbandingan ini akan memberikan gambaran tentang besarnya tingkat pengungkapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibandingkan dengan pengungkapan wajib yang seharusnya disajikan dalam CaLK menurut SAP yang berlaku. Oleh karena itu, Penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$DISC = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam PSAP}}$$

Pengukuran tingkat pengungkapan dalam penelitian ini akan menggunakan sistem skoring, dimana sistem skoring merupakan system pemberian skor pada daftar checklist pengungkapan. Datar checklist pengungkapan sendiri dibuat berdasarkan pada pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Indeks pengungkapan yang akan digunakan mencakup 185 butir pengungkapan yang dianggap mampu mewakili item-item wajib yang seharusnya diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independent atau yang disebut variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab pada perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel independent yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah, kekayaan daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, umur

pemerintah daerah dan temuan audit. Variabel-variabel ini diperoleh dari laporan keuangan pemerintah provinsi. Adapun pengukuran masing-masing variabel independent adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah

Ukuran suatu entitas dapat menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran tersebut dapat digambarkan dengan beberapa variabel, yang berupa total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Khasanah, 2014). Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sumarjo, 2010; Lesmana, 2010; dan Hilmi, 2012) menggunakan total aset sebagai gambaran dari ukuran pemerintahan. Begitu pula dengan penelitian ini yang juga akan menggunakan total aset sebagai gambaran dari ukuran pemerintahan. Total aset dipilih karena memiliki nilai yang dianggap lebih stabil. Selain itu, aset juga dapat menunjukkan atau menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Perhitungan pada ukuran pemerintahan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) dimana perhitungan data total aset ditransformasikan ke dalam logaritma natural, karena total aset memiliki nilai yang dapat mencapai satuan milyar atau triliun rupiah, sedangkan variabel lainnya hanya memiliki satuan yang relative sedikit. Maka total aset harus ditransformasikan ke dalam logaritma natural agar hasil olahan data secara ekonometrik tidak bermasalah dan dapat

diinterpretasikan. Perhitungan ukuran pemerintah diproksikan sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{total aset})$$

2. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah dapat diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah digunakan karena memiliki peran didalam mengukur kekayaan daerah. Walaupun kontribusinya tidak terlalu besar terhadap total kekayaan pemerintah daerah secara keseluruhan, namun PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri dan merupakan potensi pendapatan asli daerah. Pengukuran pada kekayaan daerah ini mengacu pada penelitian (Setyaningrum & Syafitri, 2012) dimana perhitungan data PAD ditransformasikan ke dalam logaritma natural karena nilai PAD yang dimiliki mencapai satuan milyar, sehingga nilai PAD harus ditransformasikan ke dalam logaritma natural agar hasil olahan data tidak bermasalah dan dapat diinterpretasikan. Perhitungan kekayaan daerah dapat diproksikan sebagai berikut:

$$\text{WEALTH} = \text{Ln}(\text{pendapatan asli daerah})$$

3. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas

akuntansi pada unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan barang, yang oleh karenanya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar standar akuntansi yang diselenggarakannya. Penelitian ini akan menggunakan total seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat dalam suatu daerah sebagai pengukur jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ukuran ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yulianingtyas, 2010; dan Hilmi, 2012). Pengukuran jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diproksikan dengan:

$$\text{SKPD} = \text{Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap Provinsi}$$

4. Umur Pemerintah Provinsi

Umur suatu organisasi dapat dilihat dari seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. Umur administratif pemerintah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Variabel umur pemerintah provinsi diukur berdasarkan sejak diterbitkannya peraturan perundangan pembentukan pemerintah provinsi yang bersangkutan. Penggunaan umur pemerintah berdasarkan pada hari jadi dapat menggambarkan lama provinsi tersebut telah berdiri. Pengukuran umur pemerintah provinsi dapat diproksikan sebagai berikut:

$$\text{AGE} = \text{Umur Pemda berdasarkan undang – undang pembentukan Pemda}$$

5. Temuan Audit

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh pihak BPK terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi atas pelanggaran yang dilakukan suatu provinsi terhadap ketentuan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Pengukuran temuan audit dalam penelitian ini akan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan BPK atas penyimpangan dan ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran untuk temuan audit dapat diproksikan dengan:

$$\text{FIND} = \text{Jumlah temuan audit}$$

3.4 METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data merupakan suatu teknik atau prosedur yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian yang digunakan di dalam metode ini dapat berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk membantu menggambarkan keadaan atau fakta yang sebenarnya dari suatu penelitian, yaitu untuk memberikan gambaran secara umum mengenai karakter variabel dalam penelitian (Khasanah, 2014). Analisis ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel. Perhitungan pada statistik deskriptif terdiri dari *mean*, *median*, *variance*, *range*, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel. *Mean* merupakan nilai rata-rata data yang terdapat dalam penelitian. Maksimum merupakan nilai terbesar dari jumlah nilai yang terdapat

dalam penelitian. Minimum adalah nilai terkecil yang ditemukan dalam penelitian. Standar deviasi dapat digunakan sebagai penentu jenis data yang sering terjadi di dalam penelitian.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prosedur berikutnya yang harus dilakukan supaya hasil analisis data pada penelitian ini dapat memenuhi syarat pengujian. Tujuan dari uji asumsi klasik ini sendiri adalah untuk dapat mengetahui apakah hasil dari regresi berganda terjadi penyimpangan dari asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi yang normal atau diambil dari populasi yang normal atau tidak (Nazaruddin & Basuki, 2017). Uji normalitas dilakukan dengan menerapkan statistik nonparametric *Kolmogronov-Smirnov*. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi berupa, data residual normal yaitu ketika nilai sig yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, sedangkan data tidak residual normal yaitu ketika nilai sig yang dihasilkan kurang dari 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak akan terjadi korelasi di antara variabel independennya. Pendeteksian adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF kurang dari

10, maka tidak ada gejala multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai *tolerance* lebih dari 0.10, maka terdapat gejala multikolinieritas (Gani & Amalia, 2015).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diuji menggunakan *Glejser* dengan bantuan aplikasi SPSS. Nilai signifikansinya adalah >0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji pengaruh dua atau lebih *variable independen* terhadap satu *variable dependen*. Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$DISC_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 SIZE_{it} + \beta_2 WEALTH_{it} + \beta_3 SKPD_{it} + \beta_4 AGE_{it} + \beta_5 FIND_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

DISC : Tingkat pengungkapan laporan keuangan

SIZE : Total aset

WEALTH : Kekayaan daerah
SKPD : Jumlah SKPD
AGE : Umur administratif pemerintah
FIND : Indeks pembangunan manusia

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk melihat kemampuan variable independen dalam menjelaskan variasi variable dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari *Adjusted R²* yang diubah ke dalam bentuk presentase. Presentase sisanya akan dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak dimasukkan kedalam Penelitian.

3.4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial, atau menggunakan uji statistik t. Uji statistik t, yaitu pengujian koefisien regresi secara parsial dengan menentukan formula statistik yang akan diuji. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau dengan melihat nilai signifikansi dari t-hitung. Jika nilai t-hitung > t-tabel atau nilai signifikansi $t < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah variabel independen secara parsial signifikan mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menguji pengaruh beberapa faktor tertentu terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yang akan dikumpulkan dan diolah dari laporan keuangan pemerintah daerah provinsi meliputi data total asset yang menggambarkan ukuran daerah, Pendapatan Asli Daerah yang menggambarkan kekayaan daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, umur pemerintah daerah provinsi dan temuan audit. Masing-masing data tersebut merupakan data yang dicantumkan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah provinsi. Tingkat pengungkapan akan dihitung berdasarkan jumlah pengungkapan wajib pemerintah daerah provinsi dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1 PEMILIHAN SAMPEL

Penelitian ini akan menggunakan sampel berupa laporan keuangan pemerintah provinsi pada periode tahun anggaran 2014-2016. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang berarti bahwa sampel akan diambil berdasarkan kriteria-kriterian yang telah ditetapkan (Yulianingtyas, 2010). Kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan sampel antara lain, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2014-2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian dari

hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyediakan data yang lengkap pada periode 2014-2016 yang diperlukan dalam proses penelitian, seperti tersedianya data-data non keuangan berupa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Jumlah provinsi di Indonesia adalah 34 provinsi, sedangkan laporan keuangan yang akan digunakan adalah laporan keuangan pada periode tahun anggaran 2014-2016. Maka, laporan keuangan yang diharapkan dapat digunakan didalam penelitian ini berjumlah 102 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. Dari 102 laporan keuangan pemerintah daerah provinsi terdapat 1 laporan keuangan yang memiliki hasil audit berupa opini yang menyatakan bahwa BPK tidak memberikan pendapat, dan 101 laporan keuangan yang memiliki hasil audit BPK yang berupa opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian. Dari 101 laporan keuangan tersebut yang memberikan data yang lengkap untuk dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 78 laporan keuangan. Rincian perhitungan jumlah sampel tercantum dalam tabel 4.1.

Table 4.1 Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Total
LKPD Provinsi periode 2014-2016 yang telah diaudit oleh BPK	102
LKPD Provinsi yang memiliki opini audit tidak memberikan pendapat	(1)
LKPD Provinsi yang tidak menyediakan data penelitian yang lengkap	(23)
LKPD Provinsi yang digunakan sebagai sampel penelitian	78

4.2 ANALISIS DESKRIPTIF

Sampel dalam penelitian ini menggunakan 78 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, dari sampel tersebut diperoleh statistik deskriptif yang mencakup banyaknya data yang diperoleh (n), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (*standar deviation*) atas variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut adalah total aset, kekayaan daerah yang diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, umur pemerintah provinsi, dan temuan audit. Hasil statistik deskriptif disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini:

Table 4.2 Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISC (Tingkat Pengungkapan)	78	0,43	0,69	0,5835	0,05132
SIZE (Ukuran Pemerintah)	78	28,01	33,72	29,7307	1,07113
WEALTH (Kekayaan Daerah)	78	23,19	31,24	27,9777	1,32817
SKPD (Jumlah SKPD)	78	21	740	76,94	133,350
AGE (Umur Pemerintah Provinsi)	78	2	66	47,12	19,101
FIND (Temuan Audit)	78	1	19	6,53	3,581
Valid n	78				

Sumber : Output SPSS diolah 2018

1. Tingkat Pengungkapan

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel 4.2 merupakan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai minimum pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada periode 2014-2016 adalah 43%, sedangkan nilai maksimumnya adalah sebesar 69%. Nilai rata-rata pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada periode tahun 2014-2016 adalah sebesar 58,35%, pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, akan tetapi di tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pemerintah provinsi harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, dan beberapa provinsi cenderung belum siap dalam melakukan penerapan tersebut.

2. Ukuran Pemerintah

Penelitian ini menggunakan variabel ukuran pemerintah diukur dengan menggunakan proksi total asset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Perhitungan total asset pada penelitian ini di ubah ke dalam bentuk logaritma natura untuk dapat mempermudah uji regresi. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintahan memiliki nilai minimum sebesar 28,01, nilai maksimum sebesar 33,72, dengan nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 29,7307, dan standar deviasi sebesar 1,07113. Nilai minimal yang berarti pemerintah provinsi memiliki ukuran paling kecil adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan nilai maksimal atau pemerintah

provinsi yang memiliki ukuran yang besar adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah pada penelitian ini akan diukur berdasarkan total dari pendapatan asli daerah dari pemerintah provinsi. Menurut tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata kekayaan daerah adalah sebesar 27,9777, dengan nilai kekayaan terendah dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara sebesar 23,19, dan nilai kekayaan tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 31,24. Kekayaan daerah pemerintah provinsi yang menjadi sampel pada Penelitian memiliki standar deviasi sebesar 1,32817.

4. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah diukur berdasarkan total jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah provinsi. Tabel 4.2 menjelaskan hasil statistik deskriptif yang diketahui bahwa rata-rata jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi adalah sebesar 76,94 SKPD, sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 133,350. Pemerintah provinsi dengan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 740 SKPD dan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah terendah adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 21 SKPD.

5. Umur Pemerintah Provinsi

Variabel umur pemerintahan provinsi pada penelitian ini akan diukur berdasarkan sejak diterbitkannya peraturan perundang-undang

tentang pembentukan pemerintah provinsi yang bersangkutan. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata umur pemerintah provinsi adalah sebesar 47,12, sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 19,101. Provinsi dengan umur termuda adalah Provinsi Kalimantan Utara yang berumur 2 tahun, sedangkan provinsi tertua adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan masing-masing berumur 66 tahun.

6. Temuan Audit

Temuan audit diukur berdasarkan temuan pada laporan hasil Penelitian Badan Pemeriksa Keuangan. Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata temuan audit pada setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebesar 6,53 temuan, dan standar deviasi sebesar 3,581. Temuan audit paling sedikit terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan temuan sebanyak 1 temuan, sedangkan temuan terbanyak terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan 19 temuan.

4.3 UJI ASUMSI KLASIK

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah model regresi untuk peramalan akan memenuhi asumsi-asumsi di dalam regresi berganda. Tahapan uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam Penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data yang akan dianalisis untuk melihat apakah data tersebut memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov* terhadap nilai residual pada hasil persamaan regresi. Apabila nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada Penelitian ini disajikan pada tabel 4.3.

Table 4.3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
	n	78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,04130855
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,071
	Positive	0,067
	Negative	-0,071
	Kolmogorov-Smirnov Z	0,630
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,823

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS diolah 2018

Dari tabel 4.3 uji normalitas diketahui bahwa nilai pada *Asymp Sig (2- tailed)* adalah 0,823, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. Berdasarkan hasil tersebut maka data yang diolah dapat dikatakan berdistribusi normal. Hal ini

menunjukkan bahwa uji normalitas telah terpenuhi dan data yang digunakan layak untuk diolah.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada model regresi akan ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas diantara variabel, maka dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai *VIF* < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Pada penelitian ini uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.4.

Table 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
SIZE (Ukuran Pemerintah)	0,139	7.217
WEALTH (Kekayaan Daerah)	0,207	4.827
SKPD (Jumlah SKPD)	0,236	4.237
AGE (Umur Pemerintah Provinsi)	0,447	2.239
FIND (Temuan Audit)	0,946	1.057

a. Dependent Variable: DISC

Sumber : Output SPSS diolah 2018

Hasil dari uji multikolinearitas pada tabel 4.4 tersebut menyatakan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai *VIF* < 10, nilai *VIF*

dari setiap variabel independen pada penelitian ini apabila dilihat dari tabel 4.4 adalah sebagai berikut; nilai VIF untuk ukuran pemerintah adalah 7,217, untuk kekayaan daerah adalah 4,827, untuk jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 4,237, untuk umur pemerintah provinsi sebesar 2,239, dan untuk temuan audit adalah sebesar 1,057. Hasil uji multikolinearitas juga menyatakan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10, nilai tersebut adalah sebagai berikut; nilai *tolerance* pada variabel ukuran pemerintah sebesar 0,139, pada variabel kekayaan daerah sebesar 0,207, pada jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 0,236, pada umur pemerintah provinsi adalah 0,447, dan pada temuan audit adalah sebesar 0,946. Berdasarkan nilai VIF dan *tolerance* dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada setiap model regresi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *gletjer*. Yaitu apabila nilai $\text{sig} > 0,05$, maka model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 4.5.

Table 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	0,149	0,149		1,003	0,319
	SIZE (Ukuran Pemerintah)	-0,006	0,007	-0,268	-0,917	0,362
	WEALTH (Kekayaan Daerah)	0,003	0,005	0,171	0,715	0,477
	SKPD (Jumlah SKPD)	-0,00003699	0,000	-0,191	-0,852	0,397
	AGE (Umur Pemerintah Provinsi)	0,000	0,000	-0,299	-1,837	0,070
	FIND (Temuan Audit)	0,001	0,001	0,084	0,754	0,454

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber : Output SPSS diolah 2018

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas memiliki variabel dengan nilai sig > 0,05, yaitu ukuran pemerintah dengan nilai sig sebesar 0,362, untuk kekayaan daerah sebesar 0,477, untuk jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebesar 0,397, untuk umur pemerintah provinsi sebesar 0,070, dan untuk temuan audit memiliki nilai sig sebesar 0,454. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.4 ANALISIS REGRESI BERGANDA

Model analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran pemerintah, kekayaan daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, umur pemerintah provinsi, dan temuan audit. Variabel yang akan

dipengaruhi adalah tingkat pengungkapan LKPD Provinsi di Indonesia. Hasil perhitungan regresi berganda pada penelitian ini disajikan dalam tabel 4.6 berikut:

Table 4.6 Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t-statistik	Sig. t
(constant)	0,043	0,258	0,169	0,866
SIZE (Ukuran Pemerintah)	0,000	0,012	0,037	0,970
WEALTH (Kekayaan Daerah)	0,018	0,008	2,212	0,030
SKPD (Jumlah SKPD)	0,00002531	0,000	0,337	0,737
AGE (Umur Pemerintah Provinsi)	0,000	0,000	1,105	0,273
FIND (Temuan Audit)	0,001	0,001	0,686	0,495
R ² = 0,352				
Adj. R ² = 0,307				
n = 78				
Signifikan pada tingkat signifikansi α 5% atau 0,05				

Sumber : Output SPSS diolah 2018

Secara matematis hasil dari analisis regresi berganda pada tabel 4.6 dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0,043 + 0,000 \text{ SIZE} + 0,018 \text{ WEALTH} + 0,000 \text{ SKPD} + 0,000 \text{ AGE} + 0,001 \text{ FIND}$$

Dari persamaan diatas menunjukkan pengaruh variabel independen (SIZE, WEALTH, SKPD, AGE, dan FIND) terhadap variabel dependen (Y atau tingkat pengungkapan LKPD Provinsi). Arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,043 menyatakan bahwa, apabila variabel bebas atau independen bernilai nol, maka nilai pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia adalah sebesar 0,043.
2. Koefisien SIZE sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada SIZE, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,000.
3. Koefisien WEALTH sebesar 0,018 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada WAELTH, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,018.
4. Koefisien SKPD sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada SKPD, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,000.
5. Koefisien AGE sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada AGE, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,000.
6. Koefisien FIND sebesar 0,001 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada FIND, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,001.

4.5 UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat kemampuan variabel independen di dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.7.

Table 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,593 ^a	0,352	0,307	0,04272

a. Predictors: (Constant), FIND (Temuan Audit), SIZE (Ukuran Pemerintah), AGE (Umur Pemerintah Provinsi), SKPD (Jumlah SKPD), WEALTH (Kekayaan Daerah)

Sumber : Output SPSS diolah 2018

Hasil yang didapatkan pada uji koefisien determinasi (*Adjusted R*²) berdasarkan tabel 4.7 adalah sebesar 0,307 atau 30,7%. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dapat dijelaskan sebesar 30,7% oleh variabel-variabel independen yang digunakan didalam penelitian ini. Variabel independen tersebut adalah ukuran pemerintahan (SIZE), kekayaan daerah (WEALTH), jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), umur pemerintah provinsi (AGE), dan temuan audit (FIND). Sedangkan sisanya sebesar 69,3% (100%-30,7%) lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini.

4.6 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan hasil uji statistik t untuk mengetahui hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh ukuran pemerintah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Uji statistik t pada tabel 4.6 menyatakan bahwa nilai signifikansi t dari kekayaan daerah lebih kecil daripada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,970 > 0,05$, sehingga pernyataan tersebut

menggambarkan bahwa H_1 ditolak, yang berarti bahwa umur pemerintah provinsi tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Pengaruh kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Uji statistik t pada tabel 4.6 menyatakan bahwa nilai signifikansi t dari kekayaan daerah lebih kecil daripada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,030 < 0,05$, sehingga pernyataan tersebut menggambarkan bahwa H_2 diterima, yang berarti bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Pengaruh jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Uji statistik t pada tabel 4.6 menyatakan bahwa nilai signifikansi t dari kekayaan daerah lebih kecil daripada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,737 > 0,05$, sehingga pernyataan tersebut menggambarkan bahwa H_3 ditolak, yang berarti bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Pengaruh umur pemerintah provinsi terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Uji statistik t pada tabel 4.6 menyatakan bahwa nilai signifikansi t dari kekayaan daerah lebih kecil daripada nilai signifikansi α . Nilai

tersebut adalah $0,273 > 0,05$, sehingga pernyataan tersebut menggambarkan bahwa H_4 ditolak, yang berarti bahwa umur pemerintah provinsi tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Uji statistik t pada tabel 4.6 menyatakan bahwa nilai signifikansi t dari kekayaan daerah lebih kecil daripada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,495 > 0,05$, sehingga pernyataan tersebut menggambarkan bahwa H_5 ditolak, yang berarti bahwa temuan audit tidak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

4.7 PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi antara lain adalah karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik tersebut meliputi ukuran pemerintah, kekayaan daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, umur pemerintah daerah, dan temuan audit. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa ukuran pemerintah (H_1), jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (H_3), umur pemerintah provinsi (H_4) dan temuan audit (H_5) tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi, sedangkan kekayaan daerah (H_2) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah provinsi. Selanjutnya akan dibahas tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

4.7.1 Ukuran Pemerintah

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa koefisien variabel ukuran pemerintahan adalah sebesar 0,000, yang memiliki arti bahwa disetiap terdapat kenaikan 1 nilai pada ukuran pemerintahan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi akan meningkat sebesar 0,000. Nilai signifikansi t yang diperoleh pada penelitian ini adalah 0,970 lebih besar dari nilai signifikansi alpha 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yulianingtyas (2010) dan Katoppo (2016) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Kepemilikan asset yang besar dan tidak diimbangi dengan kemampuan yang memadai atas pencatatan asset dapat menjadi kendala dalam melaporkannya pada laporan keuangan. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena pencatatan yang dilakukan belum dilakukan dengan baik. Besaran ukuran pemerintahan juga belum tentu berpengaruh pada tingkat laporan keuangan pemerintah yang baik dan optimal. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan pengelolaan dan kontribusi yang belum optimal seperti halnya kurangnya pemeliharaan aset dan pencatatan yang belum baik. Seperti menurut (Katoppo, 2016) yang menyatakan bahwa aset pemerintah daerah yang biasanya berjumlah

besar dan tidak diiringi dengan kemampuan yang memadai dalam melakukan pencatatan aset, sehingga sering terjadi kendala dalam melakukan pelaporan karena aset yang dimiliki belum dicatat dengan baik. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai asset suatu provinsi belum tentu dapat menjamin peningkatan pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

4.7.2 Kekayaan Daerah

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis, variabel kekayaan daerah menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,018 dimana setiap terdapat kenaikan 1 nilai pada pengukuran kekayaan daerah, maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi akan mengalami kenaikan sebesar 0,018. Sedangkan nilai signifikan $0,030 < 0,05$ memiliki arti bahwa H_2 diterima dan kekayaan daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2012) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah akan memberikan tekanan yang lebih besar pula terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan, karena setiap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah diperoleh dari kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertanggungjawaban pemerintah

daerah dalam melakukan pengungkapan pada laporan keuangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar kekayaan suatu daerah, maka semakin besar pula dorongan pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

4.7.3 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pada penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil koefisien pada jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 0,000 yang berarti apabila terdapat kenaikan sebesar 1 satuan pada jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi akan mengalami kenaikan sebesar 0,000. Hasil pengolahan data dengan regresi menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,737. Hasil tersebut lebih besar daripada tingkat *level of significant* yang telah ditentukan sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Hilmi (2012) yang juga menyatakan bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal tersebut terjadi kemungkinan karena terdapat pengelolaan dan penata usaha Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masih belum menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku karena kurangnya system pengawasan terhadap laporan keuangan oleh aparat yang berwenang dalam hal pengawasan, misalkan oleh inspektorat atau BPKP belum maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah Satuan Kerja

Perangkat Daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

4.7.4 Umur Pemerintah Provinsi

Pada penelitian ini diperoleh hasil koefisien sebesar 0,000 yang berarti apabila terdapat kenaikan 1 satuan pada pengukuran umur pemerintah provinsi maka akan terdapat kenaikan sebesar 0,000 pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil signifikansi pada umur pemerintah provinsi adalah sebesar 0,273 yang memiliki nilai lebih besar dari alpha yang telah ditentukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah umur pemerintah provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan. Umur pemerintahan tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi kemungkinan karena rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang dilakukan pada setiap tahun, dan menghasilkan pegawai baru diseluruh provinsi di Indonesia secara merata. Hal ini mengakibatkan kualitas sumber daya manusia disetiap bidang keuangan menjadi sama atau hampir sama diseluruh provinsi. Hal tersebut mengakibatkan umur pemerintahan tidak terlalu mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Provinsi di Indonesia.

4.7.5 Temuan Audit

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai koefisien pada temuan audit adalah 0,001 yang berarti bahwa setiap terdapat penambahan 1 satuan pada temuan audit maka akan menambah nilai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi sebesar 0,001. Hasil pengolahan data ini juga menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,495 lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha yang telah ditetapkan yaitu 5%, maka disimpulkan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hilmi (2012) dan Khasanah (2014) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hendriyani (2015) juga menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan pihak audit internal yaitu inspektorat atau BPKP yang telah melakukan audit akan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki temuan-temuan audit yang telah ditemukan. Adanya perbaikan sesuai dengan rekomendasi tersebut maka opini yang diberikan mendapatkan opini wajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia pada periode 2014-2016 adalah sebesar 58,35%, dengan tingkat pengungkapan terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2014 sebesar 43% dan tingkat pengungkapan tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur pada periode 2014 sebesar 69%.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dibuktikan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran ukuran pemerintah yang digambarkan dengan nilai total asset yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dibuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran kekayaan daerah yang digambarkan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh setiap pemerintah

dapat memiliki pengaruh terhadap besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.

4. Berdasarkan hasil dari pengolahan data di atas dibuktikan bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran jumlah SKPD yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi, dikarenakan setiap SKPD akan memiliki kegiatan yang sama.
5. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dibuktikan bahwa umur pemerintah provinsi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran umur pemerintah provinsi yang dinilai berdasarkan undang-undang pembentukan pemerintahan yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.
6. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dibuktikan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran temuan audit yang ditemukan oleh BPK tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.

6.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi sebagai pertimbangan dalam membuat aturan, bagi tingkat internal maupun eksternal pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, agar pengungkapan pelaporan keuangan menjadi lebih baik dan mengalami peningkatan kedepannya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan mempertimbangkan kualitas dari pengungkapan laporan keuangan pemerintah untuk dapat melihat perbandingan pengungkapan laporan keuangan dari sisi kualitasnya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel lain untuk dapat meningkatkan penelitian seperti pendapatan transfer, jumlah penduduk, tingkat penyimpangan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Effendy, Y. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 13(1), 46–55.
- Gani, I., & Amalia, S. (2015). *Alat Analisis Data; Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial*. (M. Bendatu, Ed.). Yogyakarta: CV. Andi.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1), 25–33.
- Hilmi, A. Z. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Katoppo, Y. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Khasanah, N. L. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akuntansi*, 3(3), 1–11.
- Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Thesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

- Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2007). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Jurnal Akuntansi*, 2004(32).
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. (2017). *Analisis Statistik dengan SPSS* (Edisi Pert). Yogyakarta: Danisa Media.
- Octasia, N. (2018). Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. (Sarmadan, Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Bisnis Dan Manajemen*, 6(April), 45–62.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. (Ayub, Ed.). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 1999. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta

Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten / Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.

Lampiran 1 Tabel *Checklist* Kriteria Tingkat Pengungkapan Laporan

Kuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan

NAMA PROVINSI :

TAHUN :

Keterangan :

1 : YA

0 : TIDAK

CHECKLIST PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI			1	0
A	Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, serta pencapaian target sesuai Peraturan Daerah APBD.			
	1.	Kebijakan fiskal/keuangan mengungkapkan:		
	a.	Perbedaan penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya/dengan anggaran/dengan rencana lainnya.		
	b.	Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.		
	2.	Ekonomi makro, menjelaskan pengungkapan:		
	a.	Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat pencapaiannya.		
	b.	Perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.		
B	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan			
	1.	Menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR.		
	2.	Menjelaskan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu.		
	3.	Perbandingan target sebagaimana tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya.		
C	Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.			
	Kebijakan Akuntansi			
	1.	Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan.		
	2.	Isi kebijakan akuntansi meliputi penjelasan:		
	a.	Entitas pelaporan		
	i	Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada.		

		ii	Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.		
		iii	Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.		
		iv	Jumlah unit entitas akuntansi yang secara struktural berada dibawahnya.		
	b.		Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.		
			Pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari Laporan Keuangan Pemerintah yang semestinya diungkapkan.		
	c.		Basis penyusunan laporan keuangan adalah basis kas menuju akrual (<i>cash basis toward accrual</i>), sehingga:		
		i	Basis yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran adalah basis kas.		
		ii	Basis yang digunakan dalam neraca adalah basis akrual		
	d.		Basis pengakuan dan pengukuran:		
			Aset		
			Pengakuan aset: aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasannya berpindah.		
			Pengukuran aset, sebagai berikut:		
		i	Kas dicatat sebesar nilai nominal.		
		ii	Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.		
		iii	Piutang dicatat sebesar nilai nominal.		
		iv	Persediaan dicatat sebesar: (1) Biaya perolehan apabila dengan pembelian, (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.		
		v	Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya, kecuali untuk investasi dalam saham berdasarkan tingkat kepemilikannya, yakni: 20% kepemilikan saham menggunakan metode biaya; 20%-50% kepemilikan saham menggunakan metode ekuitas; >50% menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan non permanen menggunakan nilai bersih yang direalisasikan.		

		vi	Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun jika tidak dimungkinkan dapat didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.			
		vii	Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.			
		Kewajiban				
			Pengakuan kewajiban: kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.			
			Pengukuran kewajiban: kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.			
			Kewajiban dalam mata uang asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.			
		Ekuitas				
			Ekuitas secara keseluruhan dicatat sebesar selisih antara aset dan kewajiban.			
			Ekuitas dana lancar dicatat sebesar selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.			
			Ekuitas dana investasi dicatat sebesar selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.			
			Ekuitas dana cadangan dicatat sebesar cadangan yang ditujukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
		Pendapatan				
			Pengakuan pendapatan: pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.			
			Pengukuran pendapatan: berdasarkan asa bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.			
		Belanja				
			Pengakuan belanja: belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.			
		Penerimaan Pembiayaan				

		Pengakuan penerimaan pembiayaan saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.		
		Pengukuran penerimaan pembayaran dilaksanakan berdasarkan asa bruto.		
		Pengeluaran Pembiayaan		
		Pengukuran pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.		
		Metode penyajian laporan arus kas		
		Metode penyajian yang digunakan untuk menyajikan laporan arus kas dan alasannya.		
		Penjelasan setiap pos pada laporan keuangan		
		NERACA		
		ASET		
		Kas dan setara kas		
		Menjelaskan rincian kas yang terdiri dari:		
	i	Kas di Kas Daerah		
	ii	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	iii	Kas di Bendahara Penerimaan		
		Investasi Jangka Pendek		
		Menjelaskan rincian investasi jangka pendek.		
		Perubahan harga pasar.		
		Piutang Pajak dan Bukan Pajak		
		Menjelaskan rincian piutang yang mencakup:		
	i	Piutang pajak		
	ii	Piutang Retribusi		
	iii	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
	iv	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
	v	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
	vi	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
	vii	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	viii	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	ix	Piutang Lainnya		
		Persediaan		
		Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian persediaan seperti: perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat; barang/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang masih dalam proses produksi yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.		
		Kondisi persediaan tersebut.		
		Investasi Jangka Panjang		
		Menjelaskan rincian investasi jangka panjang berdasarkan jenisnya, meliputi:		

		i	Investasi Nonpermanen, mencakup:		
			(a) Pinjaman Jangka Panjang		
			(b) Investasi dalam Surat Utang Negara		
			(c) Investasi dalam Proyek Pembangunan		
			(d) Investasi Nonpermanen lainnya		
			Penjelasan singkat atas perusahaan daerah		
			Perubahan pos investasi		
		ii	Investasi permanen, mencakup:		
			(a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
			(b) Investasi Permanen lainnya		
			Penjelasan singkat atas perusahaan daerah		
			Perubahan pos investasi		
			Aset Tetap		
			Menjelaskan klarifikasi aset tetap dan rincian lebih lanjut, meliputi:		
		i	Rincian Tanah		
			Penambahan/Pelepasan Tanah		
		ii	Rincian Peralatan dan Mesin		
			Penambahan/Pelepasan Peralatan dan Mesin		
		iii	Rincian Gedung dan Bangunan		
			Penambahan/Pelepasan Gedung dan Bangunan		
		iv	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
			Penambahan/Pelepasan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
		v	Rincian Aset Tetap Lainnya		
			Penambahan/Pelepasan Aset Tetap Lainnya		
		vi	Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan		
			Informasi penyusutan, meliputi:		
		i	Nilai penyusutan		
		ii	Metode penyusutan yang digunakan		
		iii	Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan		
		iv	Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode		
			Tambahan jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:		
		i	Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap		
		ii	Tanggal efektif penilaian kembali		
		iii	Jika ada, nama penilai independen		
		iv	Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti		
		v	Nilai tercatat setiap jenis aset tetap		
			Tambahan untuk konstruksi dalam pengerjaan, meliputi:		
		i	Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya		
		ii	Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya		

		iii	Jumlah biaya yang telah dikeluarkan			
		iv	Uang muka kerja yang diberikan			
		v	Retensi			
		Dana Cadangan				
		Penjelasan dana cadangan, meliputi:				
		i	Perda pembentukannya			
		ii	Tujuan, jumlah, bentuk penanaman dana cadangan, dan rencana penggunaannya			
		Aset Lainnya				
		Menjelaskan rincian aset lainnya yang mencakup:				
		i	Tagihan Penjualan Angsuran			
		ii	Tuntutan Perbendaharaan			
		iii	Tuntutan Ganti Rugi			
		iv	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
		v	Aset Tak Berwujud			
		vi	Aset Lain-lain			
		KEWAJIBAN				
		Utang Jangka Pendek				
		Rincian utang jangka pendek berdasarkan pemberi pinjaman, mencakup:				
		i	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
		ii	Utang Bunga			
		iii	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
		iv	Pendapatan Dibayar Dimuka			
		v	Utang Belanja			
		vi	Utang Jangka Pendek Lainnya			
		Utang Jangka Panjang				
		Rincian utang jangka panjang pemberi pinjaman, mencakup:				
		i	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan			
		ii	Utang dalam Negeri-Obligasi			
		iii	Premium (Diskonto) Obligasi			
		iv	Utang Jangka Panjang Lainnya			
		Jumlah tunggakan disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.				
		Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.				
		Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.				
		Biaya pinjaman meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang digunakan.				
		Utang Jangka Panjang yang direstrukturisasi harus mengungkapkan:				
		i	Pengurangan pinjaman			
		ii	Modifikasi persyaratan utang			

		iii	Pengurangan tingkat bunga pinjaman			
		iv	Pengunduran jatuh tempo pinjaman			
		v	Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman			
		vi	Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan			
		EKUITAS				
		Klasifikasi ekuitas, meliputi:				
		i	Ekuitas Dana Lancar			
			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana lancar, meliputi:			
			(a) Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)			
			(b) Cadangan Piutang			
			(c) Cadangan Persediaan			
			(d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek			
		ii	Ekuitas Dana dan Investasi			
			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana investasi yang meliputi investasi yang:			
			(a) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang			
			(b) Diinvestasikan dalam aset tetap			
			(c) Diinvestasikan dalam aset lainnya			
			(d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang			
		iii	Ekuitas Dana Cadangan			
			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana cadangan			
		LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		PENDAPATAN				
		Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan, meliputi:				
		i	Rincian dan penjelasan PAD, yang terdiri dari:			
			(a) Pendapatan pajak daerah			
			(b) Pendapatan retribusi daerah			
			(c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
			(d) Lain-lain PAD yang sah			
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran PAD.			
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang PAD periode ini dengan PAD periode yang lalu.			
		ii	Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer yang terdiri dari:			
			(a) Dana Perimbangan			
			Dana Bagi Hasil Pajak			
			Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			

			Dana Alokasi Umum		
			Dana Alokasi Khusus		
			(b) Pendapatan Transfer Lainnya		
			Dana Otonomi Khusus		
			Dana penyesuaian		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran transfer.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara tranfer periode ini dan transfer periode yang lalu.		
		iii	Rincian dan penjelasan lain-lain pendapatan yang sah , yang terdiri dari:		
			(a) Pendapatan Hibah		
			(b) Pendapatan Dana Darurat		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran lain-lain pendaptan yang sah.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara lain-lain pendapatan yang sah periode ini dan lain-lain pendapatan yang sah periode lalu.		
			BELANJA		
		i	Rincian dan penjelasan belanja operasi, yang terdiri dari:		
			(a) Belanja Pegawai		
			(b) Belanja Barang		
			(c) Bunga		
			(d) Subsidi		
			(e) Hibah		
			(f) Bantuan Sosial		
			Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
		ii	Rincian dan penjelasan belanja modal, yang terdiri dari:		
			(a) Belanja Tanah		
			(b) Belanja Peralatan dan Mesin		
			(c) Belanja Gedung dan Bangunan		
			(d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
			(e) Belanja Aset Tetap Lainnya		

			(f) Belanja Aset Lainnya		
			Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
		iii	Belanja Tak Terduga		
			Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			TRANSFER		
		i	Rincian transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota, terdiri dari:		
			(a) Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota		
			(b) Retribusi		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran transfer.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			PEMBIAYAAN		
		i	Rincian penerimaan pembiayaan, mencakup:		
			(a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)		
			(b) Pencairan dana cadangan		
			(c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
			(d) Pinjaman Dalam Negeri		
			(e) Penerimaan kembali pinjaman		
			(f) Penerimaan piutang daerah		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran penerimaan pembiayaan.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara penerimaan pembiayaan periode ini dan penerimaan pembiayaan periode yang lalu.		
		ii	Rincian pengeluaran pembiayaan		
			(a) Pembentukan dana cadangan		
			(b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		

			(c) Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri			
			(d) Pemberian pinjaman			
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran pengeluaran pembiayaan.			
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pengeluaran pembiayaan periode ini dan pengeluaran pembiayaan periode yang lalu.			
		LAPORAN ARUS KAS				
		i	Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar dari aktivitas operasi			
		ii	Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari investasi aset nonkeuangan			
		iii	Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan			
		iv	Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran			
		e.	Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan masa transisi SAP			
		f.	Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan Keuangan			
D		Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan				
	1.	Penjelasan mengenai kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.				
E		Pengungkapan lainnya				
	1.	Mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, penggabungan/pemekaran entitas tahun berjalan, kejadian yang mempunyai dampak social.				
		Total Item				

Sumber: (Octasia, 2018), (Undang-undang Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

Lampiran 2 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Provinsi	Total item yang harus diungkapkan	Jumlah item yang diungkapkan			Tingkat pengungkapan LKPD Provinsi		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
Aceh	185	110	110	115	0,59	0,59	0,62
Sumatera Utara	185	122	99	104	0,66	0,54	0,56
Sumatera Barat	185	119	109	111	0,64	0,59	0,60
Jambi	185	111	107	108	0,60	0,58	0,58
Sumatera Selatan	185	113	109	110	0,61	0,59	0,59
Bengkulu	185	105	98	98	0,57	0,53	0,53
Lampung	185	108	96	84	0,58	0,52	0,51
Bangka Belitung	185	121	119	112	0,65	0,64	0,61
DKI Jakarta	185	121	118	119	0,65	0,64	0,64
Jawa Barat	185	117	114	112	0,63	0,62	0,61
D.I Yogyakarta	185	123	119	115	0,66	0,64	0,62
Jawa Timur	185	128	116	117	0,69	0,63	0,63
Bali	185	111	112	104	0,60	0,61	0,56
Nusa Tenggara Barat	185	117	112	112	0,63	0,61	0,61
Nusa Tenggara Timur	185	106	100	108	0,57	0,54	0,58

Kalimantan Barat	185	115	105	98	0,62	0,57	0,53
Kalimantan Tengah	185	110	105	101	0,59	0,57	0,55
Kalimantan Selatan	185	120	117	103	0,65	0,63	0,56
Kalimantan Utara	185	80	85	87	0,43	0,45	0,47
Sulawesi Utara	185	117	118	100	0,63	0,64	0,54
Sulawesi Tengah	185	111	107	104	0,60	0,58	0,56
Sulawesi Tenggara	185	117	106	108	0,63	0,57	0,58
Gorontalo	185	102	104	99	0,55	0,56	0,54
Maluku	185	112	92	97	0,61	0,50	0,52
Maluku Utara	185	112	107	101	0,61	0,58	0,55
Papua Barat	185	90	92	90	0,49	0,50	0,49

Lampiran 3 Ukuran Pemerintah

Provinsi	Total Aset			Size		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Aceh	20.906.506.241.211,50	16.128.417.420.379,10	18.911.685.653.620,30	30,67	30,41	30,57
Sumatera Utara	16.465.581.739.483,30	12.307.648.066.986,50	14.152.149.422.267,70	30,43	30,14	30,28
Sumatera Barat	9.684.014.728.536,24	7.168.026.165.849,71	8.152.807.500.452,42	29,90	29,60	29,73
Jambi	8.517.755.697.517,34	5.390.176.322.973,96	6.230.703.051.277,51	29,77	29,32	29,46
Sumatera Selatan	18.257.096.675.399,00	13.760.363.152.958,60	15.278.308.849.172,10	30,54	30,25	30,36
Bengkulu	3.283.774.150.891,79	3.191.506.117.380,39	3.902.701.234.736,33	28,82	28,79	28,99
Lampung	6.109.073.617.993,28	4.328.153.194.287,29	4.883.232.964.193,85	29,44	29,10	29,22
Bangka Belitung	4.358.687.025.014,85	3.391.450.064.905,03	3.776.442.444.256,73	29,10	28,85	28,96
DKI Jakarta	425.353.600.919.701,00	421.061.389.203.531,00	442.977.223.000.927,00	33,68	33,67	33,72
Jawa Barat	28.614.139.178.798,00	25.574.494.189.275,00	28.286.541.521.361,30	30,98	30,87	30,97
D.I Yogyakarta	7.085.704.720.674,56	5.313.019.451.167,96	6.050.819.887.074,37	29,59	29,30	29,43
Jawa Timur	25.914.348.383.925,00	26.958.068.256.199,10	30.127.166.768.664,60	30,89	30,93	31,04
Bali	6.413.739.380.985,85	6.616.048.443.600,04	8.554.849.314.153,75	29,49	29,52	29,78
Nusa Tenggara Barat	11.963.681.039.484,80	10.918.318.404.272,90	11.890.842.470.329,10	30,11	30,02	30,11
Nusa Tenggara Timur	6.228.497.977.949,74	4.485.512.908.015,47	5.354.336.886.082,92	29,46	29,13	29,31

Kalimantan Barat	5.626.886.849.281,49	6.913.584.525.008,09	7.593.574.406.129,42	29,36	29,56	29,66
Kalimantan Tengah	10.237.049.599.816,90	8.884.606.823.878,64	9.588.975.812.763,61	29,96	29,82	29,89
Kalimantan Selatan	10.728.332.295.263,30	10.116.946.834.569,40	10.978.570.678.646,60	30,00	29,95	30,03
Kalimantan Utara	1.455.465.437.048,69	1.807.408.029.499,59	3.085.669.471.621,87	28,01	28,22	28,76
Sulawesi Utara	4.576.695.729.099,16	4.829.525.823.823,14	6.150.958.263.758,74	29,15	29,21	29,45
Sulawesi Tengah	4.914.468.007.761,47	3.750.216.984.209,60	4.211.734.102.128,60	29,22	28,85	29,07
Sulawesi Tenggara	7.383.457.550.987,49	7.545.880.421.393,98	8.189.043.983.872,14	29,63	29,65	29,73
Gorontalo	2.028.958.052.928,39	1.562.126.692.223,32	1.725.280.421.553,68	28,34	28,08	28,18
Maluku	5.142.900.347.644,74	4.148.811.786.282,06	4.672.543.530.525,62	29,27	29,05	29,17
Maluku Utara	1.968.264.197.174,14	2.258.733.559.619,02	2.873.883.233.063,29	28,31	28,45	28,69
Papua Barat	10.130.351.024.695,90	7.894.905.303.026,41	9.030.570.639.651,61	29,95	29,70	29,83

Lampiran 4 Kekayaan Daerah

Provinsi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Wealth		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Aceh	1.731.130.839.637,14	1.972.049.032.901,98	2.060.180.945.551,33	28,18	28,31	28,35
Sumatera Utara	4.416.811.865.266,62	4.883.880.619.308,22	4.954.833.100.869,00	29,12	29,22	29,23
Sumatera Barat	1.729.222.284.039,71	1.876.733.122.795,38	1.964.148.975.798,55	28,18	28,26	28,31
Jambi	1.281.239.472.808,44	1.241.223.028.011,76	1.233.514.644.109,54	27,88	27,85	27,84
Sumatera Selatan	2.422.673.788.768,86	2.534.526.413.315,20	2.546.177.544.348,66	28,52	28,56	28,57
Bengkulu	672.064.468.248,82	701.300.383.228,96	731.556.734.069,69	27,23	27,28	27,32
Lampung	2.274.685.572.912,86	2.247.342.667.611,39	2.368.796.251.247,34	28,45	28,44	28,49
Bangka Belitung	563.108.840.861,42	571.802.890.055,14	574.258.443.819,77	27,06	27,07	27,08
DKI Jakarta	31.274.215.885.719,00	33.686.176.815.708,00	36.888.017.587.716,00	31,07	31,15	31,24
Jawa Barat	15.038.153.309.919,00	16.032.856.414.345,00	17.042.895.113.672,00	30,34	30,41	30,47
D.I Yogyakarta	1.464.604.954.200,16	1.593.110.769.595,00	1.673.749.196.521,51	28,01	28,10	28,15
Jawa Timur	14.442.216.534.958,90	15.402.647.674.502,50	15.817.795.024.796,90	30,30	30,37	30,39
Bali	2.920.416.697.074,56	3.041.298.422.524,52	3.041.195.258.456,21	28,70	28,74	28,74
Nusa Tenggara Barat	1.115.060.397.173,45	1.372.661.567.125,26	1.359.844.019.437,97	27,74	27,95	27,94
Nusa Tenggara Timur	763.300.806.702,00	882.315.240.378,00	995.186.120.952,06	27,36	27,51	27,63

Kalimantan Barat	1.621.610.890.848,66	1.702.542.350.065,28	1.664.338.991.973,47	28,11	28,16	28,14
Kalimantan Tengah	1.253.708.122.296,09	1.174.969.266.556,62	1.158.303.928.014,48	27,86	27,79	27,78
Kalimantan Selatan	2.898.704.954.479,94	2.684.908.313.880,91	2.500.073.656.773,63	28,70	28,62	28,55
Kalimantan Utara	11.833.885.267,48	370.047.613.759,32	507.955.516.972,13	23,19	26,64	26,95
Sulawesi Utara	937.681.926.708,00	1.012.945.961.386,00	981.044.559.607,00	27,57	27,64	27,61
Sulawesi Tengah	824.611.352.385,31	904.937.124.509,16	939.092.069.082,07	27,44	27,53	27,57
Sulawesi Tenggara	599.942.751.257,23	667.079.209.826,08	753.658.254.463,85	27,12	27,23	27,35
Gorontalo	281.920.210.038,54	289.657.151.141,95	311.223.202.411,81	26,36	26,39	26,46
Maluku	425.425.607.781,12	390.813.371.781,13	466.208.198.074,09	26,78	26,69	26,87
Maluku Utara	203.059.697.909,92	236.054.304.107,32	280.150.113.342,76	26,04	26,19	26,36
Papua Barat	306.674.697.583,22	322.799.297.751,61	338.811.109.228,89	26,45	26,50	26,55

Lampiran 5 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi	SKPD		
	2014	2015	2016
Aceh	50	50	50
Sumatera Utara	52	44	44
Sumatera Barat	47	47	47
Jambi	36	36	39
Sumatera Selatan	61	61	58
Bengkulu	41	41	41
Lampung	40	52	52
Bangka Belitung	36	36	36
DKI Jakarta	737	709	740
Jawa Barat	52	49	47
D.I Yogyakarta	30	30	30
Jawa Timur	72	74	74
Bali	37	37	37
Nusa Tenggara Barat	116	118	118
Nusa Tenggara Timur	39	50	50
Kalimantan Barat	42	44	44
Kalimantan Tengah	37	37	37
Kalimantan Selatan	21	22	22
Kalimantan Utara	28	28	28
Sulawesi Utara	113	132	128
Sulawesi Tengah	54	54	54
Sulawesi Tenggara	41	41	41
Gorontalo	34	34	34
Maluku	73	77	79
Maluku Utara	46	47	47
Papua Barat	43	48	48

Lampiran 6 Umur Pemerintah Provinsi

Provinsi	Age		
	2014	2015	2016
Aceh	58	59	60
Sumatera Utara	64	65	66
Sumatera Barat	56	57	58
Jambi	56	57	58
Sumatera Selatan	55	56	57
Bengkulu	47	48	49
Lampung	50	51	50
Bangka Belitung	14	15	16
DKI Jakarta	15	16	17
Jawa Barat	64	65	66
D.I Yogyakarta	57	58	59
Jawa Timur	64	65	66
Bali	56	57	58
Nusa Tenggara Barat	56	57	58
Nusa Tenggara Timur	56	57	58
Kalimantan Barat	58	59	60
Kalimantan Tengah	58	59	60
Kalimantan Selatan	58	59	60
Kalimantan Utara	2	3	4
Sulawesi Utara	55	56	57
Sulawesi Tengah	50	51	52
Sulawesi Tenggara	50	51	52
Gorontalo	14	15	16
Maluku	56	57	58
Maluku Utara	15	16	17
Papua Barat	15	16	17

Lampiran 7 Temuan Audit

Provinsi	Find		
	2014	2015	2016
Aceh	7	5	5
Sumatera Utara	9	4	12
Sumatera Barat	3	4	2
Jambi	9	7	4
Sumatera Selatan	13	11	17
Bengkulu	9	7	7
Lampung	7	9	11
Bangka Belitung	7	8	11
DKI Jakarta	12	3	7
Jawa Barat	10	3	5
D.I Yogyakarta	4	4	4
Jawa Timur	8	5	10
Bali	5	4	5
Nusa Tenggara Barat	2	2	5
Nusa Tenggara Timur	5	12	8
Kalimantan Barat	3	5	2
Kalimantan Tengah	4	5	4
Kalimantan Selatan	2	3	3
Kalimantan Utara	1	2	7
Sulawesi Utara	19	16	7
Sulawesi Tengah	7	6	5
Sulawesi Tenggara	5	7	3
Gorontalo	7	7	3
Maluku	8	11	7
Maluku Utara	9	8	7
Papua Barat	3	6	6

Lampiran 8 Hasil Uji dan Regresi

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISC	78	,43	,69	,5835	,05132
SIZE	78	28,01	33,72	29,7307	1,07113
WEALTH	78	23,19	31,24	27,9777	1,32817
SKPD	78	21	740	76,94	133,350
AGE	78	2	66	47,12	19,101
FIND	78	1	19	6,53	3,581
Valid N (listwise)	78				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	n	78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04130855
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.067
	Negative	-.071
	Kolmogorov-Smirnov Z	.630
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.823

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.043	.258		.169	.866		
SIZE	.000	.012	.009	.037	.970	.139	7.217
WEALTH	.018	.008	.461	2.212	.030	.207	4.827
SKPD	2.531E-5	.000	.066	.337	.737	.236	4.237
AGE	.000	.000	.157	1.105	.273	.447	2.239
FIND	.001	.001	.067	.686	.495	.946	1.057

a. Dependent Variable: DISC

4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.149	.149		1.003	.319
SIZE	-.006	.007	-.268	-.917	.362
WEALTH	.003	.005	.171	.715	.477
SKPD	-3.699E-5	.000	-.191	-.852	.397
AGE	.000	.000	-.299	-1.837	.070
FIND	.001	.001	.084	.754	.454

a. Dependent Variable: RES_2

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	FIND, SIZE, AGE, SKPD, WEALTH ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 ^a	.352	.307	.04272

a. Predictors: (Constant), FIND, SIZE, AGE, SKPD, WEALTH

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.071	5	.014	7.822	.000 ^a
	Residual	.131	72	.002		
	Total	.203	77			

a. Predictors: (Constant), FIND, SIZE, AGE, SKPD, WEALTH

b. Dependent Variable: DISC

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.043	.258		.169	.866
	SIZE	.000	.012	.009	.037	.970
	WEALTH	.018	.008	.461	2.212	.030
	SKPD	2.531E-5	.000	.066	.337	.737
	AGE	.000	.000	.157	1.105	.273
	FIND	.001	.001	.067	.686	.495

a. Dependent Variable: DISC